



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023

Inspektorat Utama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor :

020/PW.09/IU/01/2024

Tanggal :

12 JANUARI 2024



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2023 disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang diperjanjikan Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum. LKjIP ini disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

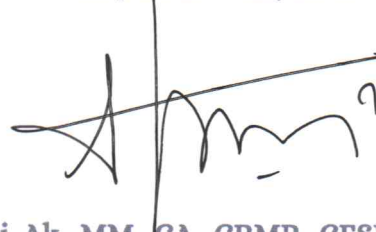
Secara eksternal, LKjIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Bawaslu dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LKjip merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Inspektorat Utama. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi seluruh jajaran Inspektorat Utama Bawaslu untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sebagai bentuk apresiasi yang luar biasa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Tahun 2023. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan LKjIP ini. Akhirnya, kami berharap LKjIP dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 12 Januari 2024

a.n Inspektur Utama

Inspektur Wilayah II



Rini Wartini, Ak., MM., CA., CRMP., CESP, CFrA, CGCAE

NIP. 19690416 199003 2001



Inspektur Wilayah I

Dr. Jufri Syahrudin, S.STP., M.Si.

Inspektur Wilayah II

Rini Wartini, Ak., MM.

Inspektur Wilayah III

Arya Mega Natalady Sumbayak, S.H.,M.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Inspektorat Utama Bawaslu 2023

Capaian Sasaran Strategis



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Inspektorat Utama Bawaslu 2023

Capaian Sasaran Program

Nilai Capaian
Tingkat Kapabilitas APIP

3,03

Kategori
Integrated



Nilai Implementasi
Reformasi Birokrasi (Area
Penguatan Pengawasan)

*belum dilakukan
penilaian oleh
Kemenpan RB

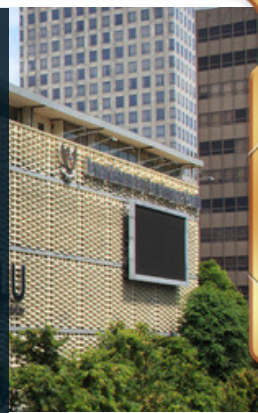
RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Inspektorat Utama Bawaslu **2023**

Capaian Sasaran Kegiatan

Nilai Evaluasi
SAKIP Bawaslu

65,91



Indeks Kepuasan Masyarakat
layanan pengawasan
internal

3,7

Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal
dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih guna mendukung pengawasan
penyelenggaraan pemilu

100%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Inspektorat Utama Bawaslu 2023

Realisasi Keuangan

Rp17.304.017.857,00

Total anggaran yang direalisasikan

97,78%

Inspektorat Utama telah merealisasikan anggaran sebesar 97,78 persen dari total pagu sebesar

Rp17.695.274.000,00

Pengelolaan anggaran Inspektorat Utama Bawaslu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses monitoring dan evaluasi kinerja anggaran terpantau melalui aplikasi SMART yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Inspektorat Utama Bawaslu 2023

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, tugas Inspektorat Utama yaitu menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2023. Atas seluruh kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 diungkapkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

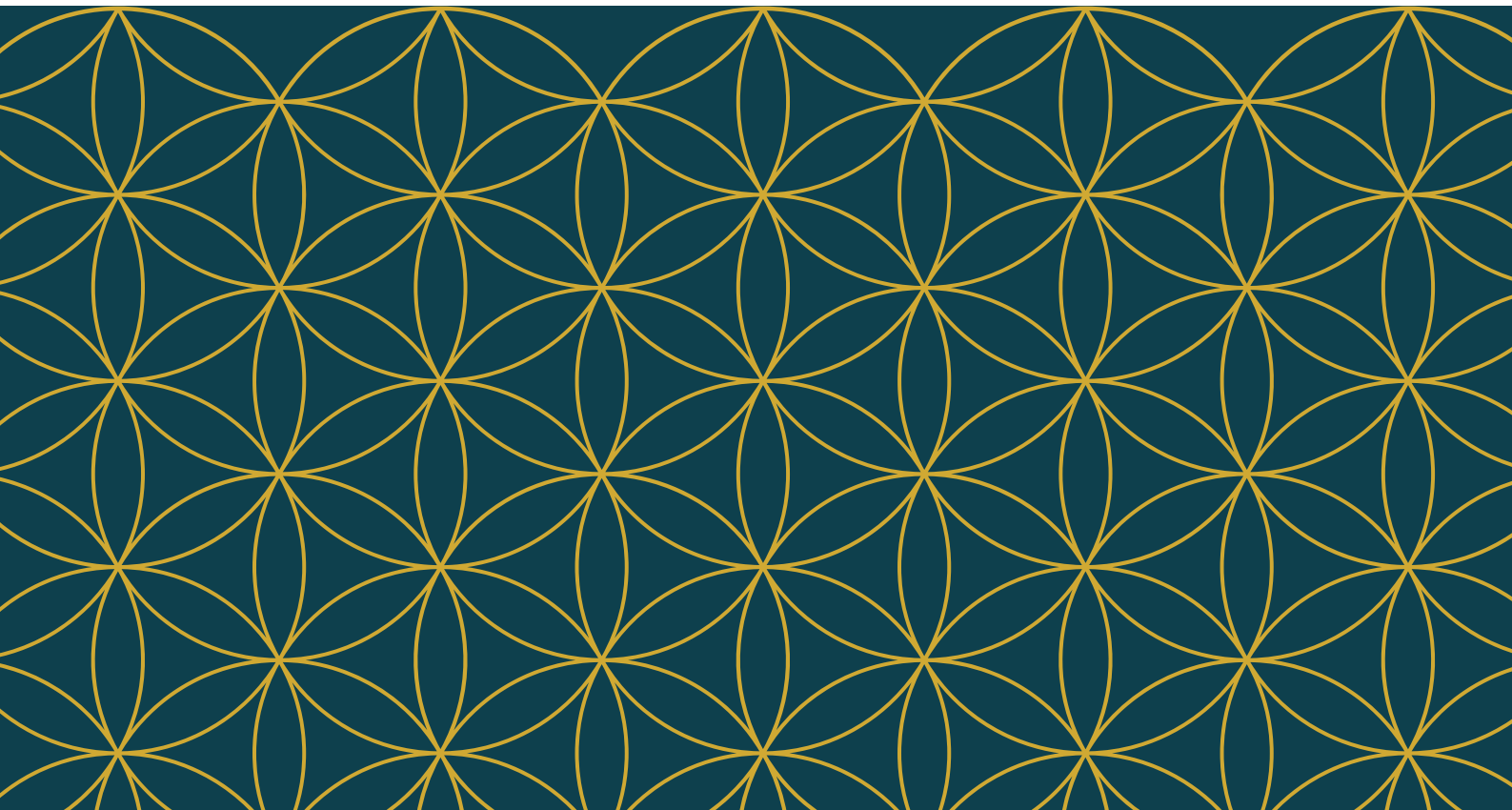
Pada tahun 2023, capaian kinerja untuk indikator “Tingkat Kapabilitas APIP” mencapai nilai 3 dan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Pengawasan Internal” memperoleh nilai 3,7 atau tercapai sebesar 100 persen. Sedangkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Inspektur Utama untuk indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi dan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I, II, dan III untuk indikator “Nilai Evaluasi SAKIP” belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil penilaian dari KemenPAN-RB TA 2023. Capaian kinerja atas indikator “Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Internal Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Guna Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu” memperoleh nilai 100 persen dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Dari sisi anggaran, capaian serapan anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 97,78 persen dari total pagu Rp17.695.274.000,00. Sementara itu, dari sisi capaian kinerja, realisasi *output* telah tercapai 100 persen dari target *output* di Renja Tahun 2023 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023. Ketercapaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tingkat serapan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Utama baik dan optimal.

BAB IV

Penutup

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
INSPEKTORAT UTAMA BAWASLU TAHUN 2023**



Penutup

Realisasi atas indikator kinerja program “Nilai Tingkat Kapabilitas APIP” Tahun 2023 adalah pada Level 3 atau 100 persen dari target. Sedangkan, atas indikator kinerja program “Nilai Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)” Tahun 2023 belum dapat dinilai karena nilai RB dimaksud berdasarkan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB yang hingga disusunnya LKjIP ini belum dirilis oleh Kementerian PAN-RB. Capaian tersebut didukung oleh faktor sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi dari para pimpinan Inspektorat Utama;
2. Kemitraan yang telah terbangun baik dengan instansi lain seperti BPKP, Kementerian PAN-RB, KPK, BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Komisi Pemilihan Umum, dan K/L lainnya; dan
3. Pembangunan budaya organisasi di unit Inspektorat Utama yang kondusif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Upaya yang telah dilaksanakan

1. Inspektorat Utama telah melakukan inovasi untuk mendukung kegiatan pengawasan melalui SAIBERDIT sebagai bentuk digitalisasi pengawasan ;
2. Inspektorat Utama telah melakukan berbagai kegiatan terkait tata kelola berupa sosialisasi dan pendampingan Manajemen Risiko, SPIP, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan *Whistleblowing System*, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Benturan Kepentingan sebagai upaya meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.
3. Inspektorat Utama telah mengintensifkan pembinaan pengelolaan keuangan dan kinerja khususnya pembinaan terkait pengelolaan keuangan anggaran Pemilu dan Pemilihan kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga diharapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dapat dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan.
4. Inspektorat Utama telah melakukan reviu LKjIP dan Evaluasi SAKIP Bawaslu, Unit Kerja Eselon I Bawaslu, Unit Kerja Eselon II Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah menjadi satker dengan memberikan rekomendasi perbaikan.
5. Inspektorat Utama telah melakukan penyediaan sarana perkantoran yang lebih memadai melalui penyediaan alat pengolah data dan alat penunjang operasional yaitu berupa *Personal Computer* dan laptop.

Tantangan yang dihadapi dan upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan

1. Belum memadainya jumlah sumber daya manusia di Inspektorat Utama dan adanya gap beban kerja antar SDM APIP. Inspektorat Utama akan bersurat kepada Biro SDM dan Umum untuk mengajukan tambahan auditor dan melakukan analisis beban kerja antar pegawai sehingga masing-masing pegawai mendapat beban kerja yang seimbang dan merata.
2. Belum meratanya kompetensi antar SDM APIP. Inspektorat Utama akan melakukan *mapping* dan analisis kebutuhan kompetensi antar SDM APIP.
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengawal dan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks e-SPI, Nilai SAKIP Bawaslu dan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Bawaslu yang mengalami penurunan pada tahun 2023.

Demikian laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 ini disusun sebagai sarana pelaporan dan evaluasi kinerja dengan harapan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang bermanfaat bagi peningkatan sistem akuntabilitas pada tahun selanjutnya serta dijadikan dasar perencanaan dan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.